

**Judul** : Industri baja tertekan, baki program MBG diisi produk impor  
**Tanggal** : Senin, 17 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Industri Baja Tertekan

# Baki Program MBG Diisi Produk Impor

ANGGOTA Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menyoroti industri baja nasional yang menjadi tulang punggung pembangunan justru makin tertekan digempur produk asing.

Hal tersebut merupakan dampak dari kebutuhan nasional yang setengahnya dipenuhi dari impor. Dia menegaskan, keadaan ini tak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera memperketat regulasi impor agar industri baja nasional tidak terus menjadi penonton di rumah sendiri.

"Baja salah satu industri strategis yang mestinya diberikan proteksi maksimal oleh negara. Dari satelit sampai peniti, bahkan baki program Makan Bergizi Gratis saja kita tidak bisa penuhi," ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah derasnya baja impor dari China, Jepang, hingga Korea. Padahal, Indonesia memiliki Krakatau Steel dan sederet perusahaan baja lain, namun hampir semuanya terseok-seok menghadapi masuknya produk impor yang terlalu leluasa.

Dia menambahkan, jika negara ingin menempatkan in-

dustri baja sebagai tuan rumah di negeri sendiri, pengetatan impor dan pemberian insentif wajib dilakukan. Selain itu, harganya harus kompetitif tanpa mengabaikan kualitasnya. Pembukaan keran impor diminta tidak terlalu longgar dan harus dievaluasi menyeluruh. "Kita bicara kedaulatan industri strategis. Kenapa memberi kemudahan kepada pihak luar kalau BUMN dan pengusaha kita sendiri sebenarnya bisa?" kata politikus Partai NasDem itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menilai, ketergantungan tinggi terhadap baja impor, terutama dari China, adalah alarm keras bagi Pemerintah. Pemerintah harus segera merevitalisasi industri baja nasional. Data Kementerian Perindustrian, kata dia, menunjukkan 55 persen kebutuhan baja nasional masih dipenuhi impor, sementara utilitas pabrik baru 50 persen. Hal ini bukan sekadar daya saing, tapi soal kedaulatan ekonomi. "Bagaimana mungkin bicara industrialisasi jika bahan bakunya masih bergantung impor?" ucap anggota Fraksi PKB itu.



**Asep Wahyuwijaya**

Dia menyoroti sempitnya orientasi produsen baja nasional yang hanya menasar konstruksi dan infrastruktur. Padahal, sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi seperti otomotif, perkapalan, alat berat, hingga energi justru mengandalkan impor baja khusus karena belum bisa diproduksi massal di dalam negeri.

"Itu menunjukkan tidak adanya peta jalan yang komprehensif. Fokusnya sempit di

konstruksi, sementara sektor bernilai tambah tinggi dikuasai impor," ujarnya.

Karena itu, dia mendesak Pemerintah untuk mempercepat pemberian insentif fiskal dan pembiayaan teknologi baru, termasuk modernisasi mesin dan penerapan teknologi hijau. Perkuat safeguard dan bea masuk antidumping (BMAD) agar industri baja nasional tidak terus digerus produk murah dari luar.

Tekanan terhadap industri baja nasional diakui Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Dia menuturkan, derasnya baja impor dari China memaksa Pemerintah memperkuat perlindungan pasar sekaligus menarik investasi baru di sektor hulu. Industri baja nasional mesti memperkuat perlindungan dan standar. "Khususnya di produk hilir, mendorong investasi hulu, dan mengembangkan baja ramah lingkungan," kata Faisol, belum lama ini.

Dia menyampaikan, perbedaan antara konsumsi dan produksi nasional terus melebar, dan celah itu kini diisi 55 persen impor. Padahal, produksi baja kasar Indonesia mencapai 18 juta ton pada 2024, naik 110 persen dari

2019 dan menempatkan Indonesia di peringkat 14 dunia.

Menurutnya, utilisasi industri baja nasional yang hanya 50 persen membuat banyak pabrik idle karena produk mereka tidak terserap pasar. Mayoritas produsen masih fokus pada konstruksi sehingga pengembangan baja bernilai tambah tinggi tertinggal.

"Sektor otomotif, perkapalan, dan alat berat membutuhkan baja khusus yang pasarnya besar, tapi belum diproduksi massal di dalam negeri," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Faisol, telah memperkuat berbagai instrumen. Seperti penerapan SNI wajib, pengaturan larangan dan pembatasan, smart regulation, serta penerapan BMAD untuk menahan praktik dumping produk baja dari negara produsen besar.

Kata dia, sejumlah produk seperti slab, billet, dan hot rolled coil dari China, India, Thailand, Taiwan, Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan telah dikenakan BMAD. "Kami terus memperkuat perlindungan industri baja nasional agar mampu bersaing dan mandiri, tanpa mengabaikan kebutuhan teknologi dan investasi baru," tutupnya. ■ **PYB**